

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan dalam upaya mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Menurut Winarno istilah kebijakan (policy) secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor, baik individu seperti pejabat publik maupun kelompok atau lembaga dalam suatu bidang tertentu. Richard Rose menambahkan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan tunggal, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dan membawa konsekuensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Rizalt et al., n.d.).

Lebih lanjut, Agustino menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau justru tidak dikerjakan. Dalam pandangan Dye, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, dan seluruh aktivitas pemerintahan — bukan hanya kehendak individu pejabat — termasuk dalam cakupan kebijakan negara. Sementara itu, Riko Riyanda memaknai kebijakan publik secara sederhana sebagai rencana dasar yang disusun oleh pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat secara luas (Permata, 2020)

Kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas unik (*a unique activity*)

yang berarti mempunyai ciri-ciri khusus yang sepertinya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri khusus yang berada pada kebijakan public bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu biasanya didesain, dipikirkan, diputuskan dan dirumuskan oleh mereka yang disebut sebagai orang yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Pada sistem politik Masyarakat modern, mereka yang memiliki otoritas ialah para legislator, eksekutor, hakim, monarki administrator dan sejenisnya. Mereka ini merupakan pihak yang terlibat langsung pada urusan politik didalam sistem politik dan mempunyai tanggungjawab dan kapasitas terhadap urusan politik tersebut (Wahab, 2018).

Kebijakan publik memiliki sejumlah ciri-ciri atau karakteristik yang membedakannya dari tindakan-tindakan biasa. Menurut (Meutia, 2017), kebijakan publik harus bersifat terencana, artinya bukan tindakan yang acak atau kebetulan, melainkan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Kebijakan ini biasanya muncul sebagai hasil dari keputusan yang terstruktur dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Selain itu, kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan yang saling berkaitan dalam suatu pola tertentu. Proses ini tidak hanya berhenti pada pembuatan aturan atau undang-undang, tetapi juga mencakup implementasi dan penegakan kebijakan tersebut. Kebijakan juga harus mencerminkan pernyataan atau komitmen nyata dari pemerintah dalam menangani isu di bidang tertentu. Tidak hanya dalam bentuk tindakan aktif, kebijakan juga bisa berupa keputusan untuk tidak bertindak, yang dalam banyak kasus

memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat. Dengan kata lain, tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah sama-sama menjadi bagian dari kebijakan publik (Dewi, 2022).

Menurut William N. Dunn (2003), proses kebijakan publik mencakup lima tahap utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Penyusunan Agenda

Tahap awal dalam proses kebijakan publik adalah identifikasi dan pemilihan isu-isu strategis yang layak masuk ke dalam agenda pemerintah. Dalam tahap ini, pemerintah perlu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Isu yang muncul biasanya merupakan hasil dari dinamika pendapat para aktor kebijakan terhadap suatu masalah yang dianggap penting dan mendesak untuk ditangani.

2. Formulasi Kebijakan

Setelah suatu masalah berhasil masuk ke agenda, tahap selanjutnya adalah formulasi, yakni penyusunan alternatif solusi dan evaluasi terhadap berbagai pilihan kebijakan. Proses ini melibatkan diskusi, perdebatan, dan pertimbangan dari berbagai pihak untuk menentukan pilihan kebijakan terbaik yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

3. Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diformulasikan memerlukan legitimasi, yaitu dukungan dan pengakuan dari masyarakat dan lembaga resmi. Dalam

sistem demokrasi, legitimasi berasal dari rakyat. Oleh karena itu, warga negara perlu diyakinkan bahwa kebijakan yang akan dijalankan telah dirancang demi kepentingan bersama. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini sangat bergantung pada kepercayaan terhadap proses pembuatannya.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diformulasikan memerlukan legitimasi, yaitu dukungan dan pengakuan dari masyarakat dan lembaga resmi. Dalam sistem demokrasi, legitimasi berasal dari rakyat. Oleh karena itu, warga negara perlu diyakinkan bahwa kebijakan yang akan dijalankan telah dirancang demi kepentingan bersama. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini sangat bergantung pada kepercayaan terhadap proses pembuatannya.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan aktivitas sistematis untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dapat dilakukan secara berkala selama proses kebijakan berlangsung, mulai dari perumusan hingga pelaksanaan. Dengan begitu, perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara adaptif dan responsif terhadap situasi lapangan (Marwiyah, 2022).

Dalam merancang sebuah kebijakan, terdapat beberapa unsur pokok yang perlu diperhatikan. Menurut (Zainal Abidin, 2012) unsur unsur

kebijakan antara lain:

1. Tujuan

Tujuan adalah elemen paling mendasar dalam kebijakan publik. Tanpa adanya tujuan yang jelas, kebijakan menjadi kehilangan arah dan relevansi.

2. Masalah

Identifikasi masalah adalah kunci dalam proses kebijakan. Penetapan masalah yang keliru dapat menggagalkan keseluruhan proses kebijakan karena solusinya akan menyasar isu yang tidak tepat.

3. Tuntutan

Tuntutan biasanya muncul dari kelompok masyarakat yang merasa diabaikan dalam proses perumusan kebijakan, atau karena adanya kebutuhan baru yang timbul setelah suatu masalah terselesaikan.

4. Dampak

Dampak adalah konsekuensi yang timbul dari tercapainya tujuan kebijakan. Dampak ini bisa positif maupun negatif, dan perlu dianalisis untuk mengetahui keberhasilan kebijakan.

5. Sarana atau Alat

Pelaksanaan kebijakan memerlukan alat bantu atau instrumen. Instrumen tersebut bisa berupa kekuasaan, insentif, pelatihan, simbolisasi, maupun modifikasi kebijakan itu sendiri agar tetap relevan dengan konteks sosial yang berubah.

Relevansi teori kebijakan publik terhadap penelitian ini terletak pada

kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu program pemerintah, dalam hal ini budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Kota Batam, dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi sebagai bagian dari strategi mendukung program nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan). Budidaya ikan yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan produksi ikan lokal, tetapi juga untuk merespons masalah gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan sebagai bagian dari kebijakan pangan nasional. Dengan menganalisis tahap-tahap tersebut, penelitian ini dapat menilai apakah program budidaya ikan telah dirancang dan dilaksanakan secara optimal dalam mendukung tujuan Gemarikan.

2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi berasal dari konsep *to implement* dalam bahasa Inggris. Menurut Webster mengimplementasikan berarti menyediakan sarana dalam melakukan sesuatu agar menimbulkan akibat atau dampak terhadap sesuatu (Laoli, 2022).

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta dalam perorangan maupun berkelompok untuk mencapai suatu tujuan. Mazmanian dan Sabatier (1983) juga menjelaskan arti dari implementasi, yaitu implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah pemahaman mengenai kejadian setelah adanya suatu program di berlakukan atau

dilaksanakan. Pemahaman tersebut mencakup munculnya akibat nyata di masyarakat dan upaya-upaya mengadminstrasikannya (Delpiero Roring et al., 2021).

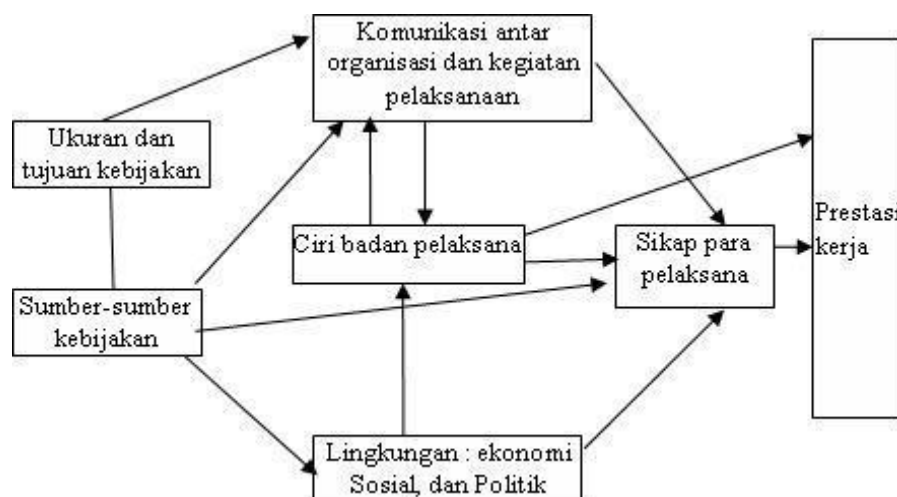
Menurut definisi para ahli diatas, pada implementasi pada kesimpulannya adalah senuah kegiatan yang dilaksanakan untuk keinginan memperoleh hasil yang diinginkan oleh pelaksana kebijakan dengan sasaran dan tujuan yang sesuai dari sebuah kebijakan itu sendiri.

Van Meter dan Van Horn dalam model implementasi kebijakan, variable yang memengaruhi kinerja dan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Standar atau sasaran kebijakan, pada dasarnya variable inimenentukan apa yang ingin dicapai dari kebijakan yang diimplementasikan dalam jangka waktu pendek, menengah hingga panjang, maupun berwujud atau tidak berwujud. Kegagalan atau keberhasilan kebijakan pada akhir program dapat dilihat jika sasaran kebijakan dapat dilihat secara spesifik.
- b. Kinerja kebijakan, sebuah penilaian pencapaian sasaran dan satandar kebijakan sesuai penetapan yang dilakukan di awal.
- c. Sumber daya, mengarah kepada ukuran anggaran dan sumber daya manusia dalam mengimplemenasikan kebijakan. Evaluasi kebijakan menjelaskan nilai kinerja dalam implementasi kebijakan.
- d. Komunikasi antar badan pelaksana, merupakan mekasisme prosedur yang dirancang dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Acuan

dalam komunikasi seperti pembahasan dalam rapat ataupun penentuan waktu dan tempat. Komunikasi antar organisasi menjadi tanda dukungan antar organisasi pemerintah terkait kebijakan yang diimplementasikan.

- e. Karakteristik badan pelaksana, menjelaskan komunikasi dan hubungan yang terjadi didalam internal organisasi, berkembangnya nilai dan ukuran daya dukung struktur organisasi.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, merupakan beberapa factor yang dapat memengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan.
- g. Sikap pelaksana, merupakan variable penting dalam implementasi kebijakan seperti antusiasme dan responstivitas kepada lingkungan dan kelompok sasaran oleh sikap pelaksana (Feronica et al., n.d.).



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Sumber: Van Meter & Van Horn (1969)

dalam (Tachjan, 2006) memiliki unsur unsur yang mutlak dan harus ada ialah:

a. Unsur Pelaksana (*Implementor*)

Merupakan kewajiban yang dimiliki pihak yang melaksanakan kebijakan public yang merupakan unit-unit birokratik atau unit-unit administrative didalam tiap tingkatan pemerintah. Tanggungjawab birokrasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan public. Pada implementasi program dan kebijakan, unit birokratik memiliki dominasi dan mempunyai peran luas dalam perumusan dan legitimasi program dan kebijakan. Namun pada perumusan tersebut, unit birokratik tidak terlalu mendominasi. Instrumen yang tepat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan memiliki kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

b. Adanya Program yang dilaksanakan

Pernyataan umum berisi tentang sasaran, tujuan dan macam-macam sarana untuk melaksanakan pernyataan tersebut akan dijabarkan lagi kedalam program yang memiliki sifat operasional. Maka dari itu, implementasi program merupakan implementasi dari kebijakan. Program yang memuat isi yang mudah dipahami serta dilaksanakan oleh pelaksana merupakan program yang bersifat operasional. Program tersebut secara jelas menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, metode dan prosedur kerja yang harus dilaksanakan dan standar yang menjadi acuan.

c. Target Groups

Kelompok sasaran atau target group merupakan organisasi dalam Masyarakat atau sekelompok orang yang akan merasakan dampak dari kebijakan seperti menerima barang atau jasa dan pengaruh terhadap perilaku. Penentuan oleh kebijakan terhadap penyesuaian diri terhadap pola interaksi diharapkan dapat diterima oleh kelompok sasaran tersebut. Kelompok Sasaram melaksanakan dan memaruhi kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan kepada isi kebijakan atau program dengan keinginan kelompok sasaran tersebut. Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki kelompok tersebut seperti keadaan sosial-ekonomi, besaran kelompok, Tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia dan pengalaman. Lingkungan menjadi pengaruh terhadap karaktersitik tersebut pada umumnya yaitu lingkungan sosial-budaya dan lingkungan geografis.

Penerimaan kebijakan dipengaruhi juga oleh faktor komunikasi, sehingga proses pencapaian atau efektivitas pelaksanaan kebijakan akan sulit apabila proses komunikasi buruk. Proses komunikasi memiliki peran menyebarkan isi kebijakan yang akan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Peran tersebut dimiliki oleh media komunikasi yang melaksanakan pemnyebaran isi kebijakn kepada kelompok sasaran (Erliana Hasan, n.d.).

Relevansi teori implementasi kebijakan publik terhadap penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana suatu program

pemerintah—dalam hal ini program budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Kota Batam—dilaksanakan secara efektif untuk mendukung tujuan kebijakan nasional, yaitu program Gemarikan. Keseluruhan elemen dari teori Van Meter dan Van Horn ini sangat relevan untuk menganalisis keberhasilan program budidaya ikan yang bertujuan meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat melalui pendekatan lokal. Keberhasilan implementasi program bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut diformulasikan dengan jelas, sumber daya dialokasikan secara memadai, komunikasi berjalan efektif antara Dinas Perikanan dan kelompok masyarakat pembudidaya ikan, serta bagaimana respons dan kesiapan kelompok sasaran dalam menerima dan melaksanakan program. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan publik memberikan kerangka kerja analitis untuk menilai apakah program budidaya ikan telah diimplementasikan secara optimal dan efektif dalam mendukung tujuan strategis Gemarikan di Kota Batam.

2.1.3. Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Tjakraadinigrat et al., n.d.) efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mana tujuan ini menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai. Sebaliknya, efisiensi berkaitan dengan perbandingan optimal antara masukan (input) dan keluaran (output), yang dikenal juga sebagai rasio input-output. Richard M. Steers menyebut bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan keluaran yang sesuai (Masyita, 2016).

Sementara itu, menurut Katz dan Kahn efektivitas adalah proses mencapai hasil maksimal bagi organisasi dengan berbagai cara, dengan dua elemen utama yang memengaruhinya (Siregar, 2020).

Efektivitas memiliki berbagai dimensi penilaian dan sangat terkait erat dengan efisiensi. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila berhasil mencapai target yang telah dirumuskan. Sondang menjelaskan bahwa efektivitas menyangkut pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah direncanakan secara sadar untuk menghasilkan barang atau jasa dari kegiatan yang dilakukan. Robbins menambahkan bahwa efektivitas menyangkut kemampuan dalam memilih dan menjalankan tindakan yang paling sesuai serta memberikan manfaat langsung (Mokosolang et al., n.d.).

Menurut Nugroho Riant, efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lima aspek penting. Pertama, tepat kebijakan, yaitu kebijakan harus mampu menjawab persoalan yang ada, sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi, serta disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang relevan dengan substansi kebijakan tersebut. Kedua, tepat pelaksana, yang menekankan bahwa pelaksana kebijakan tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi bisa juga melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara monopoli oleh pemerintah, secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, atau bahkan sepenuhnya oleh masyarakat. Ketiga, tepat sasaran, artinya target kebijakan harus selaras dengan tujuan intervensi, tidak tumpang tindih

dengan kebijakan lain, dan siap untuk diintervensi—baik melalui pendekatan baru maupun pengembangan dari kebijakan sebelumnya.

Selanjutnya, aspek keempat adalah tepat lingkungan, di mana faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Lingkungan ini mencakup institusi pembuat kebijakan, opini publik, media massa, kelompok kepentingan, serta individu-individu yang berperan dalam membentuk persepsi terhadap kebijakan tersebut. Terakhir, aspek kelima adalah tepat proses, yang terdiri dari tiga tahapan penting: *policy acceptance* (penerimaan awal, di mana masyarakat memahami kebijakan sebagai pedoman yang harus dijalankan), *policy adoption* (penerimaan kebijakan sebagai bagian penting dari masa depan), dan *strategic readiness* (kesiapan strategis, di mana baik masyarakat maupun aparat birokrasi siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut). Kelima aspek ini harus diperhatikan agar kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif dan berdampak nyata (Nugroho, 2011).

Dengan mempertimbangkan beragam indikator efektivitas program yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Nugroho (2012) sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut dinilai paling tepat, andal, dan relevan untuk mengukur pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program budidaya ikan sebagai strategi Dinas Perikanan dalam mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kota Batam. Asumsi dasar dalam pemilihan indikator ini adalah kemampuannya

dalam membedakan dan mengidentifikasi sejumlah aspek yang umumnya digunakan untuk menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan publik, baik dalam konteks internal kelembagaan maupun di tingkat eksternal yang melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat.

2.1.4. Program Gemarikan

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait peningkatan konsumsi ikan dan penyuluhan program Gemarikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Program ini dirancang untuk membentuk kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi ikan. Pelaksanaan program ini secara konsisten, ditambah dengan inovasi yang menarik, diyakini dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada Masyarakat (Sari, 2020).

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) adalah suatu langkah yang terorganisir dan terstruktur, digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gizi, baik secara individu maupun kolektif, dengan mendorong masyarakat untuk menjadikan ikan sebagai pilihan utama konsumsi. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Secara umum, Gemarikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kandungan nutrisi dan manfaat ikan bagi kesehatan;
2. Mendorong kreativitas dalam mengolah ikan untuk kebutuhan rumah tangga maupun sebagai peluang usaha kuliner;
3. Menumbuhkan budaya makan ikan sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat.

Untuk mewujudkan program Gemarikan secara optimal, diperlukan kerjasama lintas lembaga, sektor, profesi, dan budaya. Strategi ini membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa agar masyarakat semakin sadar pentingnya ikan sebagai sumber utama protein dalam makanan sehari-hari. Harapannya, konsumsi ikan yang meningkat tidak hanya memperkuat gizi masyarakat, tetapi juga mendorong kesejahteraan pelaku usaha perikanan seperti nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar produk perikanan (Marantika, 2023).

2.2 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arfiyanti, Arif Rachman (2024) (Scopus)	Prevention Of Stunting In The First 450 Days Of Life (FDL) Through Fortification Of Tuna Fish Cake	Response Surface Methodology (RSM) dengan Desain D-Optimal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fortifikasi kue ikan tuna memiliki potensi signifikan sebagai makanan tambahan untuk ibu menyusui dalam upaya pencegahan stunting pada 450

		And Formula Programming In Supporting Indonesia's National Defense In The Health Sector		hari pertama kehidupan (FDL). Berdasarkan analisis kimia, fisik, dan mikrobiologis, kue tuna yang dikembangkan mengandung energi sebesar 505 kkal dan protein 31 gram per 100 gram, melebihi angka kecukupan gizi (AKG) harian untuk ibu menyusui. Kandungan mikronutrien seperti vitamin A (352 µg), zinc (3,33 mg), dan yodium (58,32 µg) juga telah memenuhi standar AKG. Namun demikian, kandungan zat besi, vitamin B12, vitamin C, dan asam folat masih berada di bawah kebutuhan harian, sehingga perlu didukung dengan program suplementasi pemerintah. Uji mikrobiologi menunjukkan bahwa produk ini aman dikonsumsi karena memenuhi standar FDA. Secara fisik, kue ikan tuna memenuhi standar nasional dalam hal aroma, warna, dan tekstur. Dengan
--	--	---	--	---

				demikian, produk ini layak digunakan sebagai bagian dari intervensi gizi pemerintah untuk meningkatkan status gizi ibu menyusui dan mencegah stunting sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional di bidang kesehatan.
2.	Shiyam R, Purnaweni H, Rahman A (2020)	Pencegahan Stunting Melalui Program Gemarikan oleh Posyandu di Kabupaten Jepara	Kualitatif	• Peran posyandu dalam pelaksanaan program Gemarikan masih kurang konsisten karena komunikasi program tidak intens dan kurang komprehensif. Akibatnya, banyak dari ibu balita di Troso yang masih kurang paham akan program tersebut. Sementara itu pada kegiatan wajib peran posyandu sudah berjalan baik karena dilaksanakan secara konsisten. • Faktor pendorong pelaksanaan program Gemarikan adalah pola konsumsi ikan yang rendah di masyarakat dan Faktor penghambatnya adalah kondisi sumber daya manusia ibu balita yang rendah.
3.	Yolla Yulia Cahyani, Roni	Manajemen Program Gerakan	Kualitatif	• Manajemen Program Gerakan Memasyarakatkan

	Ekha Putera, Ria Ariany (2021)	Memasyarakatkan Makan Ikan oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung		Makan Ikan Oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung sudah berjalan maksimal. Perencanaan sudah berjalan baik mulai dari strategi perencanaan dengan bekerja sama antar pihak, pengaturan jadwal kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala. • Dalam pelaksanaan Program Gemarikan di Kabupaten Sijunjung ini masih saja terdapat beberapa kendala seperti kurang efektifnya anggaran yang digunakan yang membuat minimnya anggaran sehingga Program Gemarikan belum dapat dirasakan oleh seluruh daerah atau nagari di Kabupaten Sijunjung dan selain itu terdapat juga alat penunjang kegiatan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal
4.	Sarifah A, Abdul H, Rina, Angkasa P, Hamdani, Tatty Y, Dinno S,	Peningkatan Perilaku Gemarikan Pada Anak-Anak Dan Pengaruhnya Pada	Kuantitatif dan Kualitatif	• Konsumsi ikan anak-anak di PAUD Ar-Razaaq di Kecamatan Junjung Sirih mengalami peningkatan, rata-rata tingkat

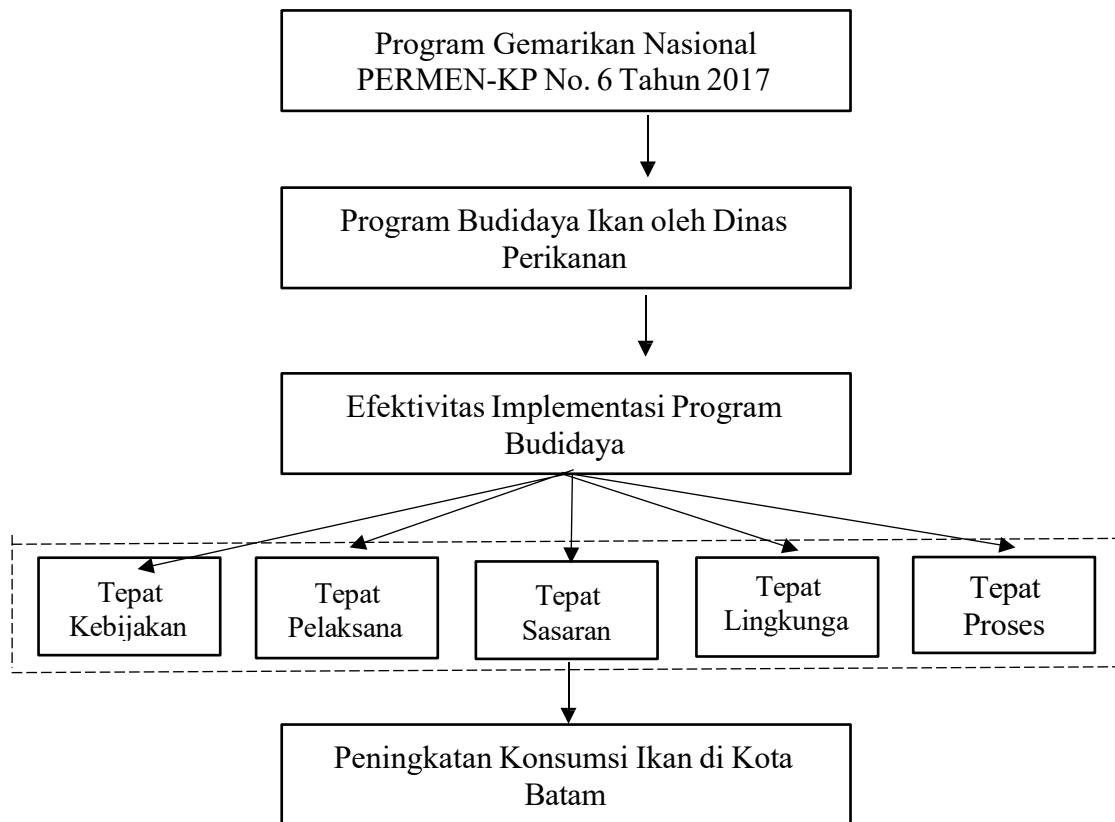
	Yenni N, Mira M, Deni A(2023)	Kesehatan Di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat		konsumsi ikan adalah 71,24persen. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi GEMARIKAN untuk meningkatkan konsumsi ikan dengan mengganti cemilan anak-anak dengan mewajibkan mengonsumsinya dengan durasi waktu dua kali dalam seminggu. Orang tua siswa juga dibekali ilmu olahan ikan dengan kegiatan pemasakan terkait cara pengolahan ikan seperti bilih krispi, nugget ikan, dan bakso ikan. Berdasarkan hasil survei, jumlah sumber daya manusia pelaku perikanan meliputi usaha sebanyak 194 orang yang tergabung dalam 14 kelompok perikanan. Bidang usaha kelompok perikanan meliputi penangkapan (80 pelaku usaha), budidaya (63 pelaku usaha) dan pengolahan (51 pelaku usaha).
5.	Abdul Rahman, Sahudi, Pahri (2020)	Efektivitas Pemberdayaan Petani Kolam	Kualitatif	• Hasil penelitian ini adalah bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada petani

		Melalui Kelompok Budidaya Ikan Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat		tambak melalui Kelompok Budidaya Ikan seperti pemberian bibit ikan, pupuk, pakan, pompa air dan pembenihan ikan, selain itu juga diberikan pelatihan cara budidaya ikan yang baik, penyuluhan tentang kegiatan budidaya ikan dan pemberian proteksi risiko usaha budidaya ikan melalui kartu asuransi, serta pemberian sarana prasarana seperti irigasi atau pengairan air. Sedangkan dilihat dari efektivitas pemberdayaan ini sudah efektif dilapangan, meskipun belum sepenuhnya terlaksana dengan menggunakan indikator efektivitas yaitu memahami program, tepat sasaran, tepat waktu, mencapai tujuan dan perubahan yang nyata. Salah satu indikator tersebut yaitu tepat waktu yang belum terlaksana dilapangan.
6.	Pisuko Herawati (2022)	Koordinasi Program Gerakan Memasyarakatkan	Kualitatif	koordinasi Program Gemarikan di Kota Administrasi

		Makan Ikan (Gemarikan) di Kota Administrasi Jakarta Pusat		Jakarta Pusat belum berjalan efektif, antara lain: (1) Interaksi komunikasi yang dilakukan Sudin KPKP Jakarta Pusat dalam koordinasi Program Gemarikan belum terjalin dengan Sudin Kesehatan Jakarta Pusat dan TPP PKK Jakarta Pusat, (2) Dalam pelaksanaan prosedural standar pelaksanaan kerja, Sudin KPKP Jakarta Pusat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan, (3) Evaluasi Program Gemarikan ada pada Forum Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (Forikan) yang sampai saat ini belum dilaksanakan, (4) Kondisi Manajemen jaringan pada koordinasi Program Gemarikan di Kota Administrasi Jakarta Pusat belum secara menyeluruh, (5) Perlu peningkatan kapasitas sumber daya dalam mekanisme koordinasi Program
--	--	--	--	--

				Gemarikan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
7.	Syaiful Bagus Marantika (2023)	Strategi Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Dalam Program Pelaksanaan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program gemarikan di Kabupaten Karanganyar masih belum maksimal dalam mencapai peningkatan konsumsi dan pemaahaman manfaat makan ikan yang signifikan. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih optimal dalam menangani masalah tersebut

2.2 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan hubungan antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat daerah dalam rangka peningkatan konsumsi ikan guna mendukung perbaikan gizi masyarakat dan pencegahan stunting, khususnya di Kota Batam. Dasar utama dari kerangka ini adalah Program Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang tercantum dalam PERMEN-KP No. 6 Tahun 2017. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang murah, bergizi, dan mudah diakses, serta menjadi bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka stunting. Di tingkat daerah, program ini diimplementasikan melalui kegiatan budidaya ikan oleh Dinas Perikanan. Program

budidaya ini berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan pasokan ikan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan lokal.

Efektivitas implementasi program budidaya ikan dinilai melalui lima indikator utama, yaitu tepat proses, tepat lingkungan, tepat sasaran, tepat pelaksana, dan tepat kebijakan. Tepat proses menunjukkan bahwa kegiatan dijalankan sesuai prosedur dan perencanaan; tepat lingkungan menunjukkan kesesuaian program dengan kondisi sosial dan geografis setempat; tepat sasaran menekankan bahwa program harus menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan; tepat pelaksana mengacu pada kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana; serta tepat kebijakan menilai kesesuaian antara arah kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Jika semua aspek ini terpenuhi, maka implementasi program diharapkan mampu meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat Kota Batam secara signifikan.